

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN EFEKTIVITAS
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS
AUDIT SEBAGAI PEMODERASI**

Wirdaningsih, Ria Nelly Sari & Vince Rahmawati

**Magister Akuntansi FEB Universitas Riau
Email: wirdaningsih@yahoo.com**

ABSTRACT

This study examine the influence of family ownership on Tax Avoidance with the effectiveness of independent commissioner and audit quality as moderator. The population in this study is a company listed on the stock exchange of indonesia, with a total sample of 62 companies. In this study using multiple linear regression technique, to test the research technique, while the data processing method used by reseacher are the multiple regression and moderate regression analysis and use SPSS version 23.00 as the software for processing the data. The result shows that family ownership affects tax avoidance, independent commissioners can moderate negatively or weaken family ownership against tax avoidance, audit quality also moderates negatively against tax avoidance on, but audit quality does not moderate tax evasion by temp measurement.

Keyword : family ownership, independent commissioner, audit quality, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber danadari berbagai sektor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Untuk APBN 1016 sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 83,4% atau senilai Rp. 1.283,6 triliun (sindonews.com 3 januari 2017).

Pencapaian penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan dapat terjadi apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Dashboard Penerimaan DJP, yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik penerimaan Pajak Non Migas maupun Pajak Migas, diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2013 s.d. 2016 (triliun rupiah)

No		2013	2014	2015	2016
1	Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
2	Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
3	Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: LAKIN DJP 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas persentase penerimaan pajak selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dari target yang sudah ditetapkan. Realisasi

penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Srimulyani, 2017). Disamping itu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2017).

Dalam kepemilikan keluarga dimana keluarga mempunyai hak control yang signifikan, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang besar yang akan dinikmati oleh keluarga secara terus menerus. Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga.

Partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat memperkuat perusahaan tersebut karena biasanya anggota keluarga sangat loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan milik keluarganya. Dengan adanya hak kontrol dari keluarga dalam pengendalian perusahaan, maka memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perusahaan keluarga pengambilan keputusan akan ditentukan oleh mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena hak control yang mereka miliki dan keterlibatan anggota keluarga pada manajemen perusahaan sehingga mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan sehingga bisa memaksimalkan laba perusahaan, sehingga deviden yang diterima lebih besar. Disamping itu perusahaan keluarga biasanya cenderung untuk mempertahankan perusahaan mereka.

Corporate Governance (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari masalah agensi dalam praktek penghindaran pajak (Armstrong *et al.* 2013). Salah satu karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisar independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Maria dan Kurniasih 2013).

Adanya komisar independen didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Para komisar independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik.

Disamping efektifitas komisar independen, kualitas audit merupakan karakteristik *corporate governance* yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi, dimana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. KAP besar (*Big four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pada KAP besar para auditornya telah banyak pelatihan dan diakui secara internasional (Nindita dan Siregar, 2012). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar (*Big Four*) akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditujukan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahawa kepemilikan keluarga pada perusahaan manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sementara di Malaysia kepemilikan keluarga pada perusahaan maunfaktur tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Sirait dan Martani, 2014).

Hal berbeda ditemukan oleh Chen *et al* (2010) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan.

Selanjutnya Gaaya *et al.*(2017) juga menemukan bahwa perusahaan keluarga di Tunisia melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak mereka dari pada perusahaan non keluarga, Gaaya *et al.*(2017) juga membuktikan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak di perusahaan keluarga di Tunisia.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian Gaaya *et al.*(2017), Disamping kualitas audit efektifitas komisaris independen juga dapat memperkuat atau memperkecil penghindaran kepemilikan keluarga terhadap praktek penghindaran pajak. Dengan berfungsi peran komisaris independen dengan efektif dalam suatu perusahaan dapat mengurangi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keluarga.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang comprehensive mengenai praktek penghindaran pajak terjadi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*).Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Masri dan Martini (2012) menjelaskan bahwa dari penghindaraan pajak juga akan menimbulkan masalah keagenan karena adanya benturan kepentingan antara dua pihak, manajer (*agent*) menginginkan bonus atas kinerja baiknya, sedangkan pemilik ingin memaksimalkan kekayaannya melalui kinerja perusahaan yang efisien. Oleh karena itu, agar dapat mengatasi konflik kepentingan tersebut, pemilik perusahaan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar bekerja lebih efisien termasuk dengan melakukan penghindaran pajak yang memberikan keuntungan bagi perusahaan pajak

Praktik penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan menimbulkan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Prasiwi, 2015). Menimimalisir konflik tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya transparansi informasi (Armstrong *et al.*,2013).

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajakmenurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) adalah adanya konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri.Pihak Wajib pajak dan pajak memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi.Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Wajib pajak menginginkan bagaimana untuk

meminimalisir pajak supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pengembalian secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan pajak menginginkan kepentingannya bagaimana supaya pemasukan ke kas negara dengan penerimaan yang sebesar-besarnya untuk keberlangsungan suatu Negara.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki tujuan mencapai beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial. Tujuan tersebut diantaranya :

- a. Membeli masukan yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa atau dipasok pemerintah untuk mendistribusikan daya beli antar warga
- b. Membiayai pengeluaran umum
- c. Menjadi alat pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada.

Menurut Musgrave & Musgrave (1989) dalam Budi (2015) dari sudut keuangan negara, pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi alokasi, yaitu proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai privat dan barang sosial;
- b. Fungsi distribusi, yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang "merata" dan "adil";
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan mempertimbangkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Penghindaran Pajak

Pohan (2009) mendefinisikan Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. *Tax Avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (Fadhilah, 2009). *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Pohan (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

- a. Adanya unsur arti fisis dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh yang pembuat undang-undang
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Kepemilikan Keluarga

Menurut Sugiarto (2009), perusahaan keluarga didefinisikan sebagai suatu bentuk perusahaan dengan kepemilikan dan manajemen yang dikelola dan dikontrol oleh pendiri atau anggota keluarganya atau kelompok yang memiliki pertalian keluarga, baik yang tergolong keluarga inti atau perluasannya (baik yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan). Sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga jika salah satu dari tiga faktor yang terdiri dari modal ekuitas, pengelolaan dan pengendalian didominasi sepenuhnya oleh keluarga (Pohjola dan Koponen, 2011).

Untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga tentu harus memiliki kriteria. Martinez, Stohrdan Bernhard (2005) mendefinisikan perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sebuah kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga, dan dimana anggota keluarga juga menjadi direksi dan *top* manajer.
- b. Perusahaan yang secara jelas dikendalikan oleh keluarga, dan anggota keluarga menjadi dewan direksi utama.
- c. Perusahaan yang dalam suatu kelompok bisnis yang berhubungan jelas dengan suatu keluarga bisnis.
- d. Perusahaan yang secara jelas berhubungan dengan kelompok bisnis dengan seorang *entrepreneur* atau pelaku bisnis tanpa keturunan langsung, tetapi ada pertanda jelas bahwa diproyeksikan dalam waktu kedepan kontrol perusahaan akan dilanjutkan oleh keturunan tidak langsungnya (Saudara kandung, sepupu, keponakan, dan lain-lain).
- e. Melakukan kontrol perusahaan dengan menunjuk sebagian anggota direksi yang didapatkan melalui mayoritas kepemilikan saham, pengaruh atas pemegang saham lain, karena untuk pengetahuan bisnis keluarga, tradisi, keyakinan atau kepercayaan, persahabatan dan lainlain.

Komisaris Independen

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* (2006:13) pengertian komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Deriksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”

Menurut komite nasional kebijakan *Corporate Governance* dalam Atsil (2015) menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
- b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
- e. Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- f. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan perusahaan.
- g. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) dalam Elfarini (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

- a. Kualitas audit adalah probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
- b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
- d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Menurut De Angelo sebagaimana dikutip Ebrahim (2001), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*big four accounting firms*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four accounting firm*). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Oleh karena

itu kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya atau tidak.

Pengaruh Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan keterlibatan yang signifikan keluarga dalam manajemen. Dengan sendirinya anggota keluarga akan mengantisipasi bahwa kepemimpinan (*leadership*) dan pengawasan (*control*) dilakukan oleh keluarga. Pengambilan keputusan dan kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari-hari dilakukan oleh keluarga. Penekanan ada pada kontrol dan peran aktif (Susanto, 2005).

Dengan ada hak mayoritas dan hak kontrol oleh suatu keluarga, hal ini menyebabkan kebijakan yang akan diambil akan ditentukan oleh keluarga. Keluarga bisa menentukan dengan mudah keputusan apa yang akan dilakukan, termasuk mengenai kebijakan perpajakan dalam perusahaan. Karena Kepemilikan keluarga adalah makhluk ekonomi, yang berusaha untuk bisa memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan pajak, Maka kepemilikan keluarga disinyalir melakukan penghindaran pajak.

H₁ : Kepemilikan perusahaan keluarga berpengaruh pada penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Efektivitas Komisaris Independen sebagai Pemoderasi

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stake holder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan membayar kewajiban pajak dengan relatif lebih murah, agar dapat memanfaatkan laba lebih maksimal. Hal ini juga bisa terjadi pada perusahaan keluarga, yang mana perusahaan keluarga juga menginginkan celah untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang dihasilkan dapat menghasilkan deviden yang lebih besar.

Berdasarkan perspektif teori agency, keberadaan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan sangat berperan dalam mengawasi jalannya tugas eksekutif yang lain, walaupun keputusan ada di tangan kepemilikan keluarga tapi dengan efektifnya komisaris independen bisa mengawasi setiap kebijakan yang merugikan stake holder yang diputuskan oleh kepemilikan keluarga, sehingga semakin efektif komisaris independen semakin mempengaruhi kepemilikan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak.

H₂ : Efektivitas komisaris independen memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Edwards, *et al.* dalam Bedard dan Michelene (1993) ada dua

pendekatan yang digunakan yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*. Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Auditor yang berkualitas akan bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang benar sehingga bisa menghasilkan audit yang berkualitas, bisa menemukan dan mendeteksi kesalahan kesalahan akuntansi dalam auditnya. Hal ini akan mempengaruhi kepemilikan keluarga yang mempunyai hak mayoritas serta mempunyai control yang ada ditangan mereka dalam mengambil keputusan tentang kebijakan perpajakan perusahaan, dan tentunya akan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang berjumlah 566 perusahaan. Sedangkan sampel dari penelitian diambil melalui proses sebagai berikut:

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2016	566
2	Perusahaan yang melakukan IPO tahun 2013-2016	(75)
3	Perusahaan sektor pelayaran	(15)
4	Perusahaan sektor keuangan perbankan	(91)
5	Perusahaan sektor property, real estate dan konstruksi bangunan dan pertambangan serta BUMN	(104)
6	Perusahaan merugi	(146)
7	Data Tidak Lengkap	(6)
8	Perusahaan kepemilikan saham keluarga < 20%	(67)
9	Perusahaan sampel	62

Sumber: Data diolah

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data diambil oleh peneliti dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbitan data yang dikeluarkan BEI berupa annual report dari tahun 2013-2016 di situs resmi BEI www.idx.co.id.

Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Variabel Dependen

1. Cash ETR

Dengan CETR diharapkan keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan baik menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer antara pembukuan akuntansi dan pajak dapat teridentifikasi (chen *et al.*, 2010).

Untuk dapat menggambarkan efek kas yang dikeluarkan terkait pajak perusahaan maka penulis menghitung penghindaran pajak dengan proksi:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

2. Temporary book tax difference (TempBTD)

Temporary book tax defferance menggambarkan bagian yang akan menambah atau mengurangi pajak di masa depan. Untuk menghitung Temporary book tax defferance diperlukan data defference tax expense yang diperoleh dari data strem Nilai Temp BTD kemudian dibagi dengan tariff pajak. Rumus Temporary book tax defferance yaitu :

$$\text{Temporary BTD} = \frac{\text{DTE}}{\text{STR}}$$

Keterangan :

DTE : defference tax expence

STR : tariff pajak badan (statutory tax rate)

Variabel Independen

1. Kepemilikan Keluarga

Menurut Nugrahanti dan Wiranata (2013) perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga (FAM) apabila pemimpin atau kelurgamemiliki lebih dari 20% hak suara dan hal ini sesuai dengan definisi dari Facio dan Lang (2002). Kepemilikan keluarga dalam perusahaan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$FAM = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Keluarga}}{\text{Jumlah saham yang Beredar}}$$

Keterangan :

FAM = Kepemilikan Keluarga

Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel moderasi menggunakan efektivitas komisaris independen dan kualitas audit.

Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Sanusi 2012).

$$\text{Kom.Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total komisaris.}}$$

Variabel Kontrol

Untuk memastikan bahwa bervariasinya penghindaran pajak hanya disebabkan oleh variabel independen yang diuji, maka penelitian ini mengontrol kemungkinan adanya pengaruh dari berbagai variabel yang memungkinkan. Adapun variabel kontrol yang digunakan antara lain: profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang memberikan gambaran tentang ringkasan data-data penelitian melalui ukuran-ukuran seperti mean, standar deviasi, varian, minimum, maksimum dengan hasil seperti dalam tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
FAM	168	21.29	91.94	53.2074	1.30808	16.95466	287.461
ROA	165	.00	105.90	7.7291	.78542	10.08895	101.787
SIZE	168	5.91	26.74	13.9770	.31233	4.04827	16.388
DER	168	.14	210.40	37.9301	3.85324	49.94374	2494.377
GROWTH	168	.00	117.99	10.0503	1.07618	13.94891	194.572
MODERASI_KOMP.IND	168	5.77	58.62	21.0249	.72314	9.37291	87.851
MODERASI_KAUDIT	83	.00	81.94	48.8936	2.26267	20.61388	424.932
CETR	168	.00	.83	.1883	.00913	.11833	.014
TEMP_BTD	168	17.11	27.94	23.5757	.15437	2.00083	4.003
Valid N (listwise)	82						

Sumber : Data Olahan SPSS, 2017

Dari hasil tabel 2 dapat diketahui statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Pada variabel penghindaran pajak (CETR), dari 168 observasi, penghindaran pajak pada perusahaan yang terendah adalah sebesar 0.00 dan tertinggi sebesar 0.83 rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak selama periode terpilih sebesar 0.1883 sementara standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 0.118

Sedangkan variabel penghindaran pajak *Temp. BTD*, dari 168 observasi, penghindaran pajak pada perusahaan yang terendah adalah 17,11 dan tertinggi 27,94 dengan rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak selama periode terpilih sebesar 23,575, sementara standar deviasi (*standar deviation*) sebesar 2.00083.

Pada variabel Kepemilikan Keluarga (FAM), terendah adalah 21,29 dan tertinggi 91,94 dengan rata-rata selama periode terpilih sebesar 53,2074. Sementara standar deviasi sebesar 16,954. Hal ini menunjukkan kepemilikan keluarga di dalam perusahaan selama periode terpilih tidak sama masing-masing perusahaan yang diamati.

Pada variabel Efektivitas Komisaris independen, diperoleh nilai terendah sebesar 5.77 dan tertinggi sebesar 58,62, dengan nilai rata-rata sebesar 21,024. Standar deviasi sebesar 9,372, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen pada masing-masing perusahaan selama periode terpilih tidak sama jumlah komisaris independen pada masing-masing perusahaan sampel.

Pada variabel Kualitas Audit, diperoleh nilai terendah sebesar 0.00 dan tertinggi sebesar 0.83, dengan rata-rata kualitas audit masing-masing perusahaan sampel selama periode terpilih sebesar 48,893. Standar deviasi sebesar 20,613, hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit perusahaan selama periode terpilih masing-masing berbeda ada yang menggunakan akuntan publik yang bukan big four dan akuntan publik big four terbaik di International.

Hasil Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas data 168 sampel pada table dapat dilihat, ternyata data berdistribusi normal, yaitu nilai signifikansi unstandardized residual sebesar 0.200 dan 0.066 berada di atas $\alpha = 0.05$, Hal ini menunjukan bahwa data layak untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 3
Uji Normalitas Dengan CETR dan Temp. BTD sebagai Variabel Dependen
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		168	168
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0072575	.0071038
	Std. Deviation	1.88769884	1.87445736
Most Extreme Differences	Absolute	.061	.067
	Positive	.061	.067
	Negative	-.036	-.044
Test Statistic		.061	.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.066 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas Variabel Dependen CETR
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.109	.043		2.552	.013
FAM	.000	.001	-.056	-.219	.827
ROA	.000	.001	-.066	-.511	.611
SIZE	.000	.002	.012	.099	.921
DER	.000	.000	.056	.428	.670
GROWTH	-.001	.001	-.147	-1.225	.224
MODERASI_KOMP.IND	.001	.002	.125	.588	.558
MODERASI_K.AUDIT	.000	.001	-.125	-.734	.465

a. Dependent Variable: Abs_RES1

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diperoleh nilai tolerance dan VIF untuk setiap variabel independen dari masing-masing hipotesis adalah <10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi pada variabel dependen CETR, hipotesis 1 diperoleh angka DW sebesar 2.165. Menurut Tony Wijaya (2013:123), berdasarkan Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson nilai D-W jika berada diantara 1,55 - 2,46 dengan kesimpulan hasil pengujian tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan, data yang dipergunakan random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi

Model Summary^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.495 ^a	.245	.173	.10432	.245	3.426	7	74	.003	1.929

a. Predictors: (Constant), MODERASI_K.AUDIT, DER, SIZE, GROWTH, ROA, MODERASI_KOMP.IND, FAM

b. Dependent Variable: CETR

Uji Heteroskedastisitas

Nilai variabel FAM, ROA, SIZE, DER, dan *Growth* memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode enter dengan bantuan SPSS dimana variabel independen yaitu kepemilikan perusahaan keluarga (FAM), variabel dependen yaitu penghindaran pajak CTR dengan variabel kontrol yaitu ROA, DER, SIZE, *Sales-Growth* dengan variabel moderasi komisaris independen dan kualitas audit.

Tabel 5
Uji Hipotesis

Model Summary^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.495 ^a	.245	.173	.10432	.245	3.426	7	74	.003	1.929

a. Predictors: (Constant), MODERASI_K.AUDIT, DER, SIZE, GROWTH, ROA, MODERASI_KOMP.IND, FAM

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil analisis di atas tabel 5, dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,245. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 24,5%.

Tabel 6
Uji Signifikansi

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.261	7	.037	3.426	.003 ^b
	Residual	.805	74	.011		
	Total	1.066	81			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), MODERASI_K.AUDIT, DER, SIZE, GROWTH, ROA, MODERASI_KOMP.IND, FAM

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui nilai signifikansi kurang dari 0,03. Artinya secara bersama-sama variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial CETR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa:

1. FAM terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.696 dan signifikansi $0,003 < 0,05$.
2. ROA terbukti tidak berpengaruh terhadap CETR. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.38 dan signifikansi $0,741 > 0,05$.
3. SIZE terbukti berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,297 dan signifikansi $0,006 < 0,05$.
4. DER tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,018 dan signifikansi $0,874 > 0,05$.
5. GROWTH terbukti berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,299 dan signifikansi $0,006 < 0,05$.

Tabel 7
Uji Koefisien Regresi secara Parsial CETR

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Zero order	Partial	Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.273	.066		4.131	.000					
FAM	.005	.002	.696	3.002	.003	.073	.337	.311	.200	5.004
ROA	.000	.001	-.030	-.332	.741	-.027	-	-	.704	1.276
SIZE	-.011	.004	-.297	-2.836	.006	-.227	-	-	.933	1.071
DER	-5.996E-5	.000	-.018	-.160	.874	-.080	-	-	.766	1.305
GROWTH	.004	.001	.299	2.820	.006	.193	.019	.016	.908	1.101
MODERA	.005	.003	.385	2.048	.044	.025	.232	.207	.289	3.459
SIK.AUDIT	-.002	.001	-.443	-2.938	.004	-.134	-	-	.448	2.231

a. Dependent Variable: CETR

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran pajak dengan pengukuran CETR dan Temp BTD

Variabel ini memiliki nilai probabilitas (p) sebesar 0.003 untuk CETR dan 0.05 untuk pengukuran Temp. BTD. Karena (p) < 0.05 maka menunjukkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (CETR) maupun Temp.BTD.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh signifikansi sebesar 0.044 dan 0.03 untuk pengukuran Temp.BTD < 0.05 . Maka dapat disimpulkan ada pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dengan interaksi kepemilikan keluarga dengan Efektivitas Komisaris independen sebagai moderasi dan ROA, DER, Size, Sales Growth sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

Pengaruh Antara Kepemilikan Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016

Berdasarkan hasil uji t diperoleh signifikan kepemilikan keluarga sebesar $0,003 < 0.05$ dan Kualitas Audit sebagai moderasi (FamAudit) sebesar dengan signifikansi sebesar $0.004 < 0.05$, dengan ROA, Size, DER dan GROWTH sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maksudnya Kualitas Audit memoderasi atau memperlemah Kepemilikan keluarga terhadap terjadinya praktek penghindaran pajak oleh perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.

SIMPULAN

1. Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu baik secara Cash ETR maupun Temp.BTD dengan ROA, DER, Size, Sales Growth sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maksudnya Kepemilikan Keluarga berpengaruh atas terjadinya praktek penghindaran pajak oleh perusahaan. Sedangkan
 - a) Efektivitas komisaris independen sebagai moderasi, mengurangi Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran Cash ETR dan pengukuran Temp.BTD pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maksudnya semakin Efektivitas Komisaris independen dalam melaksanakan pengawasannya akan memperlemah Kepemilikan Keluarga untuk melakukan penghindaran pajak di perusahaan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
 - b) Kualitas Audit memoderasi Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran cash CETR dengan ROA, DER, SiZE dan Sales Growth sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maksudnya Kualitas Audit mengurangi praktek Kepemilikan keluarga untuk melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016 secara pengukuran Cash CETR Sedangkan Pengujian terhadap hipotesis ketiga Temp.BTD dengan ROA, DER, SiZE dan Sales Growth sebagai kontrol pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016 menunjukkan Kualitas Audit tidak memoderasi pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Hal ini karena perusahaan tidak mempertimbangkan perbedaan pajak secara temporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, M. dan S. Atmini. 2008. *Determinan Tingkat Hutang serta Hubungan Tingkat Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Perspektif Pecking Order Theory*. Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia 5(2): 227-244.
- Anita. 2016. *Pengaruh Family Ownership Terhadap Kinerja Keuangan: Strategi Bisnis dan Agency Cost Sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Universitas Riau.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shelvin, T. 2010. *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firm?*. *Journal of Corporate Finance* 95,41-65.

- DDTC News.co.id diakses melalui <http://news.ddtc.co.id/artikel/11327/penghindaran-pajak-paradise-papers-jadi-alarm-pemerintah-benahi-database-pajak/>. Pada tanggal 11 November 2017.
- Ebrahim, A. 2001. *Audit Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings Management: An Additional Evidence. Paper*. Egypt: Mansoura University.
- Elfarini, Eunike Christina. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Penelitian. Universitas Negeri Semarang.
- Gaaya, S et al. 2017. *Does family ownership preduce corporate tax avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality*", Managerial Auditing Journal, Diakses melalui <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>. 18 Agustus 2017.
- Kurniasih dan Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. ISSN : 1410-4628. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ilyas dan Priantara, 2013. *Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Risiko*. Jakarta : Inter Media.
- Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill.
- Masri. I., & Martini, D. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost Of Debt*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia: Depok..
- Nindita, Chairunissa dan Sylvia Veronica Siregar. 2012. *Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 14 No.2. Universitas Indonesia.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Mediakom.
- Susanto, A.B. 2005. *Word Class Family Business*. Semarang : Quantum Bisnis dan Manajemen.
- Tony Wijayma. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. *Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Watkins, A.L. et al. 2004. *Audit Quality: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence. Journal of Accounting Literature*. No.23. p: 153-193.
- Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. The Accounting Theory*, 65, 131-157.
- www.bi.go.id
Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016